

## Sarasehan 100 Ekonom 2024

### “Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi”

Selasa, 3 Desember 2024

Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta

**Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)** adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri sejak 1995. **Sarasehan 100 Ekonom** merupakan sebuah wadah bagi para ekonom Indonesia untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam merespon persoalan dan tantangan yang perlu diselesaikan Pemerintah yang baru untuk lima tahun ke depan, dengan harapan akselerasi ekonomi dapat terjadi dan ekonomi Indonesia bisa lebih kuat.

Pada tahun ini, INDEF kembali menggelar acara Sarasehan 100 Ekonom pada Selasa, 3 Desember 2024 dengan tajuk **“Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi”**. Acara ini merupakan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang ke-8 dan menjadi rangkaian acara menuju Ulang Tahun INDEF ke-30. INDEF bekerja sama dengan CNBC Indonesia dalam penyelenggaraan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2024 dan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube INDEF dan CNBC Indonesia TV serta CNBCIndonesia.com.

Acara Sarasehan 100 Ekonom di 2024 dengan tajuk **“Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi”** diawali dengan laporan panitia Sarasehan 100 Ekonom yang disampaikan **Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini**. Dalam laporannya Eisha mengatakan bahwa ini adalah kali kedelapan INDEF menyelenggarakan Sarasehan 100 Ekonom, sebuah forum dialog dan diskusi para ekonom terkait kondisi ekonomi Indonesia.

Eisha juga menyebutkan bahwa Sarasehan 100 Ekonom ini menjadi spesial karena disertai dengan penulisan Buku 100 Ekonom, yang merupakan karya kolektif studi kebijakan yang ditulis oleh para ekonom. Buku ini merupakan gagasan dan pemikiran cerdas dari 100 ekonom yang ingin bersama-sama membangun Indonesia dan mendorong kebijakan efektif dan Indonesia keberlanjutan. Buku tersebut terdiri dari empat klaster yang merupakan tiang penyangga ekonomi. Eisha menyampaikan harapannya bahwa Sarasehan 100 Ekonom menjadi sebuah ajang komitmen bersama untuk berkolaborasi menuju Indonesia Emas.

**Esther Sri Astuti – Direktur Eksekutif INDEF** menyampaikan *welcoming speech*-nya dengan menyoroti berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Presiden baru periode 2025-2029 yang perlu dibenahi untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Esther menyebutkan berbagai tantangan tersebut di antaranya adalah: *Pertama*, ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di angka sekitar 5 persen; *Kedua*, pelemahan daya beli dan turunnya jumlah penduduk *middle income class* membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga melemah; *Ketiga*, penyempitan ruang fiskal dan beban utang yang kian meningkat; dan *Keempat*, tantangan risiko global yang kian tidak pasti karena perubahan arah kebijakan US dan konflik geopolitik yang meluas. Esther menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya mengawal fiskal dan moneter untuk dapat mengakselerasi ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh.

#### **Keynote Speech**

**Raden Pardede – Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia** memberikan *keynote speech*, mewakili Menteri Koordinator Bidang Ekonomi-Airlangga Hartanto. Pada pidatonya Raden Pardede menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Sarasehan 100 Ekonom yang sudah dilaksanakan untuk ke-8 kalinya. Diharapkan forum ini dapat menjadi wadah urun

rembuk untuk merumuskan masukan dan pemikiran dari para ekonom Indonesia yang dapat memperkuat kebijakan dalam mengakselerasi ekonomi Indonesia.

Pada pidatonya, Raden Pardede mengungkapkan bahwa kemenangan Trump menciptakan tantangan ekonomi baru di tingkat global. Hal ini membawa tantangan dan peluang baru bagi Indonesia. Dari sisi perdagangan Indonesia akan memanfaatkan GSP dari Amerika Serikat untuk pembebasan tarif bea masuk, selain itu dengan status *country strategic partner* dan kerjasama IndoPasifik serta proses keanggotaan OECD, maka posisi Indonesia akan lebih baik.

Pada kesempatan ini Raden Pardede menyebutkan strategi dalam mendorong transformasi ekonomi dalam mencapai target ekonomi, yaitu: 1. Kemudahan berusaha dan peningkatan investasi; 2. Penguatan daya beli dan pengendalian inflasi; 3. Penguatan daya saing dan nilai tambah industri; 4. Mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal; 5. Peningkatan produktivitas SDM; 6. Pemerataan pembangunan dan konektivitas; dan 7. Pemberdayaan UMKM. Raden Pardede juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat, optimisme dan komitmen ke depan.

Sarasehan 100 Ekonom kemudian beranjak ke sesi diskusi, antara para ekonom dengan para pemangku kebijakan (pemerintah), yang dalam hal ini dengan Kabinet Merah Putih. Kegiatan diskusi ini dipandu oleh **Dr. Aviliani-Ekonom Senior INDEF sebagai moderator**. Sesi diskusi dibagi ke dalam empat bagian berdasarkan klaster, yaitu: 1. **Kemandirian Pangan untuk Ekonomi Berkelanjutan**; 2. **Sinergi Industri, Investasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan**; 3. **Harmonisasi Fiskal, Moneter dan Keuangan**; dan 4. **Penguatan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkualitas**.

#### Diskusi 100 Ekonom:

**A. Klaster pertama** dengan topik **Kemandirian Pangan dan Energi untuk Ekonomi Berkelanjutan** menghadirkan **Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan** sebagai narasumber. Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa target tercapainya swasembada pangan dari Presiden Prabowo yang semula di 2029 kemudian berubah menjadi 2027. Menurutnya sederet tantangan dalam penyediaan pangan ke depan diantaranya, yaitu: perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, alih fungsi lahan, aspek distribusi, peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi dan SDM, yang dibutuhkan dari perkembangan teknologi ini literasi dan adaptasi teknologi.

Zulkifli Hasan mengatakan bahwa menuju swasembada pangan membutuhkan dukungan kebijakan yaitu: 1. Hulu-hilir satu komando; 2. Kebijakan pelepasan hutan; 3. Percepatan dokumen dan perizinan lingkungan; 4. Revitalisasi bendungan; 5. Dukungan Kementerian Diktisaintek dan Kementerian Dikdasmen program petani milenial; 6. Penelitian bidang pangan dan gizi; 7. Pemberdayaan penyuluh oleh pusat dan; 8. Kepastian status kepemilikan lahan.

Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam kurun waktu dua bulan ini, telah menyelesaikan regulasi untuk pupuk, penyuluh, dan irigasi. Zulkifli menekankan persolaan utam petani saat ini yaitu penjualan hasil tani. Sehingga untuk merespon tersebut dilakukan proses transformasi BULOG untuk menyerap hasil panen petani.

Setelah pemaparan singkat oleh **Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan**, diskusi bersama para ekonom di Klaster 1 dilakukan. Tanggapan dikemukakan oleh **M.Fadhil Hasan-ekonom senior INDEF, Prof.Muhammad Firdaus-Dosen FEM IPB dan Prof. Bayu Krisna Murthi-Dosen FEM IPB, dan Berly Martawardaya-Direktur Riset INDEF&Dosen FEB UI**. Menanggapi para ekonom, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa konsep dan aturan yang dimiliki sudah lengkap, ada dua yang tengah dilakukan yaitu optimalisasi dan membuka lahan baru untuk pertanian. Namun demikian, ada hal yang membuat berbagai upaya yang dilakukan menjadi gagal yaitu *moral hazard*.

*Aviliani selaku moderator menutup diskusi Klaster 1 dengan memberikan kesimpulan bahwa swasembada pangan harusnya bisa tercapai, jika persoalan-persoalan ini dapat diselesaikan, diantaranya yaitu: melalui kebijakan demand side, produktivitas, perubahan iklim, dan biaya yang perlu dianggarkan, serta petani juga perlu sejahtera.*

**B. Klaster kedua** dengan topik **Sinergi Industri, Investasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan** menghadirkan 4 narasumber pemangku kebijakan, yaitu: 1. *Faisol Riza -Wakil Menteri Perindustrian*; 2. *Yasserli-Menteri Ketenagakerjaan*; 3. *Temmy Satya Permana -Deputi Bidang UKM Kementerian UMKM*; dan 4. *Andi Maulana – Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Usaha Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM*.

1. Diskusi klaster 2 dimulai dengan narasumber pertama **Faisol Riza - Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia** mengangkat topik industri. Faisol Riza menyebutkan bahwa perubahan situasi perdagangan global menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia. Saat ini banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk bertemu dengan pihak Kementerian Perindustrian agar ekspor dari Tiongkok bisa dilakukan melalui Indonesia, maka dari itu perlu perbaikan regulasi dengan cepat untuk menghadapi kemungkinan serbuan investasi.

Pada RPJMN dari Asta Cita menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen diperlukan kontribusi industri non-migas 20 persen pada 2029. Hal tersebut menurut Faisol bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan upaya yang berlipat. Pemerintah menetapkan strategi, di antaranya yaitu: mengembangkan industri prioritas, akselerasi ekspor produk dan jasa industri, penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok, pengembangan industri hijau, aglomerasi kawasan industri di kawasan industri khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan industri halal.

Diskusi kemudian dilakukan dengan penyampaian tanggapan dari para ekonom: 1. *Saleh Husein-Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri*; 2. *Ahmad Heri Firdaus-Peneliti INDEF*; dan 3. *Poppy Ismalina-Dosen UGM*. Menanggapi para ekonom, Faisol Rizal mengatakan bahwa konsolidasi regulasi di semua K/L merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Selain itu Faisol menegaskan pentingnya pengendalian kebijakan buka-tutup keran impor bahan baku atau barang jadi secara sungguh-sungguh untuk melindungi industri nasional. Orkestrasi kebijakan yang ada di luar Kementerian Perindustrian didorong oleh Presiden, termasuk konsolidasi *roadmap*-nya.

*Aviliani-moderator menutup diskusi dengan memberikan kesimpulan pada diskusi pertama di klaster 2 yaitu bahwa masalah regulasi masih akan menjadi pekerjaan rumah besar terutama antar Kementerian dan Lembaga.*

2. Diskusi klaster 2 dengan narasumber kedua **Yasserli-Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia** mengangkat topik tentang ketenagakerjaan. Yasserli menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan berusaha memaksimalkan potensi manusia dengan produktivitas yang kuat. Untuk itu program kerja lima tahun kedepan adalah: Peningkatan kompetensi tenaga kerja; Perluasan kesempatan kerja; Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja; Peningkatan daya saing; Penegakkan norma ketenagakerjaan; dan Reformasi Pengelolaan Ketenagakerjaan. Yasserli mengungkapkan bahwa dengan merujuk pada Vietnam, yang memiliki struktur ketenagakerjaan yang mirip dengan Indonesia, maka untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah vokasi dan pelatihan profesional.

Diskusi kemudian dilakukan dengan penyampaian tanggapan dari para ekonom: 1. *Denni Puspa Purbasari-Direktur Eksekutif Manajemen Kartu Prakerja*; 2. *Prof. Rokhmin Dauri-Anggota Komisi IV DPR RI*. Menanggapi hal tersebut, Yasserli menyebutkan bahwa masih banyak hal yang perlu disepakati mengenai konsep upah minimum. Definisi upah minimum

perlu disepakati untuk menentukan kenaikannya berapa persen. Yasserli juga mengungkapkan bahwa telah dilakukan diskusi lintas kementerian untuk melakukan penyesuaian antara kurikulum dan kompetensi yang dibutuhkan di berbagai sektor untuk vokasi.

*Moderator-Aviliani menutup diskusi dengan memberikan kesimpulan pada diskusi kedua di klaster 2 yaitu kedepan upah minimum akan diformulasikan faktor apa yang perlu ditambahkan, penekanan pada peningkatan produktivitas, dan vokasi di Indonesia penting karena banyak yang butuh vokasi daripada pendidikan formal.*

3. Diskusi klaster 2 dengan narasumber ketiga **Temmy Satya Permana-Deputi Bidang UKM Kementerian UMKM Republik Indonesia** mengangkat topik tentang UMKM. Temmy Satya Permana mengungkapkan bahwa 99,6 persen UMKM itu adalah usaha mikro, sisanya adalah usaha kecil menengah. Dengan adanya gelombang PHK akhir-akhir ini, Temmy mengungkapkan kekhawatirannya jika usaha mikro ini akan bertambah lagi porsinya. Saat ini Kementerian UMKM tengah melakukan upaya platform satu data UMKM yang menjadi rujukan. Dari sisi pembiayaan UMKM, menurut Temmy, pada tahun depan Kementerian UMKM mengusulkan dua skema yaitu kredit aggregator dan kredit pengadaan barang-jasa pemerintah.

Diskusi kemudian dilakukan dengan penyampaian tanggapan dari para ekonom: 1. Fithra Faisal – Dosen FEB UI dan; 2. Nina Sapti – Dosen FEB UI. Berkaitan dengan hal tersebut, Temmy menanggapi bahwa UMKM selalu menjadi dagangan politik karena jumlahnya besar dan berada pada sektor informal. Kementerian UMKM terus mendorong agar UMKM ini masuk menjadi sektor formal, namun demikian banyak pelaku UMKM ini yang masih terkendala dengan manajemen aliran kas. Berkaitan dengan isu perlambatan industri, maka akan meningkatkan jumlah usaha mikro.

4. Diskusi klaster 2 dengan narasumber keempat **Andi Maulana – Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Usaha Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM Republik Indonesia** mengangkat topik tentang hilirisasi. Andi Maulana mengungkapkan bahwa efisiensi bisnis dan pemerintah telah terjadi peningkatan berdasarkan *World Competitiveness-Bank Dunia* yang menjadi daya Tarik investasi. Terkait *Global Minimum Tax* di negara-negara G20, Andi mengungkapkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM sedang mempersiapkan tambahan fasilitas insentif yang dapat diberikan ke pelaku usaha. Sementara itu upaya hilirisasi akan difokuskan pada 5-6 komoditas dengan melakukan kurasi, yaitu: melihat cadangan dan tingkat daya saing yang dimiliki.

Diskusi kemudian dilakukan dengan penyampaian tanggapan dari para ekonom: 1. Prof Candra Fajri Ananda – Guru Besar FEB Universitas Brawijaya dan 2. M. Rizal Taufikurrahman – Peneliti INDEF. Berkaitan dengan tanggapan para ekonom tersebut Andi Maulana mengungkapkan bahwa untuk mengatasi pungutan liar perizinan berusaha, saat ini sudah ada *Service Level Agreement* yang diatur di PP 5/2021. Jika semua stakeholder terkait dapat komitmen pada aturan tersebut, maka semuanya akan selesai. Sementara itu untuk mendorong investasi, didapat dari *pipeline* yang dikejar percepatan realisasi investasi dengan memberikan bantuan pada perizinan agar realisasinya lebih banyak.

- C. **Klaster tiga dengan topik Harmonisasi Fiskal, Moneter dan Keuangan** menghadirkan **Parjiono – Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Republik Indonesia**. Pada paparannya Parjiono mengungkapkan bahwa risiko ketidakpastian global mempengaruhi stabilitas ekonomi makro Indonesia. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas. Optimalisasi APBN dengan fokus pada menjaga inflasi dan daya beli.

Diskusi kemudian dilakukan dengan penyampaian tanggapan dari para ekonom: 1. Eko Listiyanto-Direktur INDEF; 2. Lukytawati Anggraeni-Dosen IPB; 3. Prof Didin Damanhuri-Ekonom Senior INDEF; 4. Prof Telisa Aulia Felianty-Guru Besar UI; dan 5. Nurhastuty Wardhani-Universitas Trisakti. Berkaitan dengan tanggapan para ekonom tersebut Andi Maulana memberikan contoh pada program Makan Bergizi Gratis yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek dan sekaligus juga merupakan investasi SDM pada jangka panjang, sebagai contoh belanja berkualitas yang memberikan dampak pada perluasan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu dalam rangka menghadapi kebijakan dagang global yang dipengaruhi Trump maka Indonesia melihat potensi ekonomi yang ada dengan melakukan perluasan jaringan internasional. Parjino juga mengungkapkan bahwa Indonesia komitmen dengan proses transisi energi, diantaranya melalui *green* sukuk, *SDGs bond*. Menurutnya *carbon trading* juga menjadi potensi, sejauh ini sudah dilakukan dengan Brazil. Untuk stabilitas keuangan, Kementerian Keuangan ada dirjen baru yaitu Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan untuk menjawab kebutuhan stabilitas keuangan. Untuk pemerataan, terdapat sejumlah fasilitas fiskal misalnya dengan subsidi KUR. Beralih ke kebijakan perpajakan yang menjadi pertimbangan adalah dampaknya bagi berbagai pihak dan keberlanjutannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga rasio penerimaan perpajakan.

Aviliani selaku moderator menutup diskusi Klaster 3 dengan kesimpulan bahwa PPN tidak mungkin ditunda dan efisiensi belanja APBN belum terlihat untuk belanja K/L baru.

**D. Diskusi Klaster ke-empat** dengan topik **Penguatan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkualitas** menghadirkan: 1. Warsito – Plt Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; 2. Stella Christie-Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset; dan 3. Hardinsyah – Ketua Majelis Wali Amanat IPB University.

1. Diskusi Klaster 4 dimulai dengan narasumber pertama **Warsito – Plt Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan** mengangkat topik tentang kapasitas dasar SDM. Warsito mengungkapkan bahwa parameter kualitas SDM diantaranya adalah kesehatan dan pendidikan. SDM berkualitas dibutuhkan pada masa bonus demografi. Untuk menjawab tantangan bonus demografi, Kemenko PMK melakukan upaya: 1. Bebas stunting; 2. Hidup sehat; 3. Pintar; 4. Bekerja; dan 5. Jaminan sosial. Selain itu menurut Warsito pendidikan merupakan pilar bagi SDM berkualitas. Peningkatan SDM berkualitas pada RPJMN 2025-2029 merupakan program super prioritas yang dilakukan dalam transformasi sosial, yang didalamnya termasuk wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, restrukturisasi guru, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi. Dari program hasil terbaik cepat Presiden, Kemenko PMK mengampu program: penuntasan TBC, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dan membangun sekolah unggulan terintegrasi.

Diskusi kemudian dilakukan dengan penyampaian tanggapan dari: 1. Inge Sanitasia Kusuma, Country Head Tanoto Foundation dan 2. I Dewa Gede Karma Wisana- Kepala Lembaga Demografi FEB UI. Berkaitan dengan dengan tanggapan tersebut menurut Warsito, anggaran PAUD ini terkait dengan peran pemerintah daerah. Kemenko PMK akan mendorong peningkatan anggaran untuk PAUD dengan kerjasama bersama Pemda dan lembaga mitra. Sementara itu untuk literasi akan didorong penguatannya dengan konsep pembelajaran menyenangkan yang terintegrasi. Di sisi lain Warsito mengungkapkan bahwa mempersiapkan SDM produktif dilakukan dengan keterampilan dan kewirausahaan.

2. Diskusi klaster 4 dengan narasumber kedua **Stella Christie-Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset Republik Indonesia** mengangkat topik pendidikan tinggi dan riset. **Stella Christie** mengejutkan para ekonom dengan memberikan pertanyaan pada ekonom.

Sebelum mengungkapkan pertanyaannya, Stella menjelaskan bahwa pertanyaannya berangkat dengan model pertumbuhan ekonomi oleh Romer. Berdasarkan Solow Growth Model bahwa pertumbuhan berkelanjutan dicapai dengan teknologi, sedangkan Growth Model oleh Romer menyatakan bahwa investasi yang tidak akan mengalami *diminishing return* adalah investasi pada manusia. Maka menurut Stella, SDM sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

**Berikut 4 pertanyaan Stella Christie pada para ekonom:** 1. Kebijakan atau prosedur ekonomi yang bisa membuat riset dianggap sebagai investasi, bukan melulu sebagai pengeluaran; 2. Bagaimana pendanaan untuk dapat menghasilkan riset kompetitif dan berkualitas dan memberikan kontribusi bagi industri?; 3. Skema ekonomi dan pendanaan untuk membiayai ekosistem perguruan tinggi, di luar skema “*tambahkan dana APBN*”; dan 4. Bagaimana menghadapi tantangan riset yang bersifat jangka panjang vs kebijakan ekonomi fokus dalam jangka pendek. Riset dasar berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi (inovasi, produktivitas) dibandingkan riset terapan.

Pada diskusi kali ini ekonom yang memberikan jawaban adalah: 1. Tanti Novianti-Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB menjawab pertanyaan nomor dua; 2. Jossy Prananta Moeis-Dosen FEB UI menjawab pertanyaan pertama; 3. Deniey A Purwanto-Associate INDEF dan Dosen FEM IPB menambahkan jawaban atas pertanyaan nomor satu; dan 4. Yorga-SBM ITB menjawab pertanyaan nomor satu dan empat. Stella Christie memberikan tanggapannya atas diskusi di atas. Stella menekankan pentingnya perguruan tinggi untuk menghargai produk riset yang berkualitas, bukan lagi kuantitas tapi kualitas. Stella mengungkapkan data di Indonesia, dari 22 ribu jurnal, hanya 11 yang kualitasnya Q1 Scopus. Disamping itu, Stella menekankan untuk memberikan eksternalitas positif sebagai dosen, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan tugas karena memang ada manfaatnya bagi mahasiswa bukan karena memang harus ada tugas. Stella juga menanggapi kerumitan birokrasi yang disampaikan Tanti Novianti. Stella juga mengapresiasi IPB karena riset manajemen-nya hingga saat ini adalah yang terbaik. Mengenai integritas dan kejujuran, Stella juga setuju untuk mengembalikan hal ini. Stella menekankan bahwa perlu ada kejelasan bahwa vokasi ini untuk merespon kebutuhan industri sehingga perlu disesuaikan terus menerus. Namun perguruan tinggi melakukan keduanya yaitu *demand* dan *supply*, harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan industri baru.

3. Diskusi Klaster 4 dengan narasumber ketiga **Hardinsyah – Ketua Majelis Wali Amanat IPB** mengangkat topik tentang kesehatan. Hardinsyah mengatakan bahwa dari capaian usia harapan hidup di Indonesia adalah hingga usia 74 tahun, namun lama pesakitannya di Indonesia sekitar 10 tahun. Menurutnya jika usianya 74, maka penurunan kesehatan (mengalami sakit) dirasakan sejak usia 64 tahun. Hardinsyah juga mengungkapkan pentingnya gizi dan lingkungan pada usia 1000 hari kehidupan. Hal tersebut dapat meningkatkan usia harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi. Jika usia harapan hidup tinggi yang sehat disertai dengan pendidikan, maka meningkatkan lama usia kerja produktif dari tenaga kerja berpengalaman, meningkatkan tabungan, kapital dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia empat penyakit utama adalah stroke, jantung, diabetes, dan TBC serta sirosis hati. Hal ini disumbang terutama dari kebiasaan merokok, diet yang tidak seimbang, dan aktivitas fisik yang rendah. Menurutnya anggaran 10.000 rupiah per paket untuk Makan Bergizi Gratis masih cukup asal itu digunakan hanya untuk paket makan di luar biaya lainnya.

Diskusi kemudian dilakukan dengan penyampaian tanggapan dari: 1. Ferry Prasetya-Dosen FEB Universitas Brawijaya ; 2. Pos M. Hutabarat- Dosen Universitas Indonesia; dan 3. Junaedi- Kadin Indonesia. Berkaitan dengan tanggapan tersebut Hardinsyah mengemukakan bahwa tata kelola informasi satu pintu sangat penting. Informasi harga lokal saat ini belum

terinformasikan pada masyarakat luas, padahal bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memenuhi gizi keluarga.

Rangkaian diskusi pada Sarasehan 100 Ekonom ditutup dengan kesimpulan dari Aviliani-moderator, yang mengungkapkan bahwa apa yang dicita-citakan pemerintah juga menjadi perhatian para ekonom. Secara umum, Sarasehan 100 Ekonom Indonesia menjadi kompas bagi pemerintah baru sebab menyediakan dialog dengan para ekonom terbaik di Indonesia. INDEF berharap para anggota Kabinet Merah Putih mendapatkan inspirasi kebijakan dari acara ini. Sehingga ekonomi Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi gejolak kondisi dunia dan memberikan kesejahteraan untuk Masyarakat Indonesia.

## **INDEF**

Jakarta, 3 Desember, 2024

Narahubung: Riza Annisa (0818-0212-3600)